

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan publik yang memerlukan peran aktif negara melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Todaro dan Smith (2015) menyatakan bahwa kemiskinan tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh tidak efektifnya kebijakan pembangunan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Oleh karena itu, pemerintah provinsi dan kabupaten memiliki posisi yang strategis dalam merancang kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan akses kelompok masyarakat miskin terhadap sumber daya ekonomi serta pelayanan dasar.

Selaras dengan pandangan tersebut, World Bank (2001) mengemukakan bahwa kemiskinan memiliki keterkaitan erat dengan terbatasnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, dan kesempatan kerja. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah yang kurang reponsif dan tidak berorientasi pada perlindungan kelompok rentan berpotensi memperburuk tingkat kemiskinan.

Badan Pusat Statistik memaknai kemiskinan sebagai suatu keadaan di mana individu atau rumah tangga tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum guna mencapai taraf hidup yang layak. Melalui pendekatan tersebut, status kemiskinan ditentukan dengan mengacu pada Garis

Kemiskinan. Garis kemiskinan didefinisikan sebagai batas minimum pengeluaran per kapita per bulan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Badan Pusat Statistik, 2005). Penduduk digolongkan sebagai penduduk miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang dimiliki berada di bawah Garis Kemiskinan yang telah ditetapkan (Badan Pusat Statistik, 2005).

Oleh karena itu, konsep kemiskinan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik bersifat absolut dan objektif, karena didasarkan pada standar kebutuhan minimu yang seragam bagi seluruh penduduk (Badan Pusat Statistik, 2005). Informasi dan data kemiskinan yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik selanjutnya dimanfaatkan sebagai landasan dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan, evaluasi pelaksanaan program sosial, serta analisis pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2005).

2.1.2 Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah merupakan instrumen utama yang digunakan oleh negara untuk mengatur, mengelola, dan mengarahkan kehidupan masyarakat demi mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah (Nugroho, 2023). Kebijakan pemerintah dapat dipahami sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh aktor pemerintah yang berwenang untuk menangani masalah publik tertentu. Kebijakan pemerintah dapat didefinisikan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang dirancang serta diimplementasikan oleh aktor-aktor pemerintah yang memiliki wewenang resmi, baik pada tingkat nasional maupun regional, dengan tujuan mengatasi permasalahan publik yang muncul dalam masyarakat (Zuhri & Sofianto, 2022). Keputusan dan tindakan tersebut dikembangkan secara sistematis melalui

proses kebijakan yang meliputi identifikasi masalah, formulasi alternatif kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, serta evaluasi kebijakan (Nugroho, 2023).

Sementara itu, Anderson (2015) mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai pola tindakan yang memiliki tujuan spesifik dan diambil oleh aktor atau kelompok aktor untuk menyelesaikan masalah publik. Dengan demikian, kebijakan pemerintah bukanlah keputusan yang bersifat sporadis, melainkan dirancang secara sistematis dan berorientasi pada tujuan tertentu. Dalam konteks pemerintahan daerah, kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam mengelola sumber daya daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi antarwilayah (Nairobi, 2024).

2.1.3 Perekonomian Daerah

Perekonomian daerah dapat dipahami sebagai representasi keseluruhan aktivitas ekonomi yang berlangsung dalam suatu wilayah administratif, yang mencerminkan kapasitas wilayah tersebut dalam mengelola serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Hardiansyah, 2025). Menurut Juliantika (2024) kondisi ekonomi suatu daerah lazimnya dinilai melalui berbagai indikator makroekonomi, di antaranya Produk Domestik Regional Bruto menunjukkan tingkat produksi dan nilai tambah ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai indikator perubahan kinerja ekonomi antar waktu, tingkat pengangguran yang menggambarkan kemampuan daerah dalam menyerap tenaga kerja, serta tingkat kemiskinan yang merefleksikan persentase penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar (Saputra, 2023).

Dinamika perekonomian daerah tidak berlangsung secara terpisah, melainkan dipengaruhi oleh keterkaitan berbagai faktor, seperti ketersediaan dan mutu faktor-faktor yang meliputi tenaga kerja, modal, serta sumber daya alam (Pratiwi, 2025). Efektivitas kebijakan publik yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat, turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi wilayah (Yuliadi, 2020). Faktor pendukung lainnya, seperti kelembagaan, ketersediaan infrastruktur, dan stabilitas ekonomi, juga berperan penting dalam menentukan keberhasilan proses pembangunan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, kajian terhadap perekonomian daerah menjadi krusial sebagai landasan dalam mengevaluasi kebijakan pembangunan dan merumuskan strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Respitarsi, 2021).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Faulana *et. al.* (2021) mengkaji model pengentasan kemiskinan melalui kebijakan PKH di Jawa Tengah, dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode analisis deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya pengentasan kemiskinan melalui kebijakan PKH di Provinsi Jawa Tengah, yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH di Kabupaten Wonosobo berkontribusi baik terhadap penurunan tingkat kemiskinan dengan cukup efektif. Kondisi ini menegaskan perlunya strategi keberlanjutan agar tujuan utama PKH, yakni pemutusan rantai kemiskinan dapat tercapai secara mandiri dan keberlanjutan (Faulana et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Widyaiswara dan Budiati (2017) adalah penelitian yang membahas mengenai tata kelola percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dalam studi kasus di Kota Semarang dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer dan sekunder bersumber dari situs program pemerintah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tata kelola program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah belum terintegrasi secara optimal, baik dalam hubungan antar pemerintah maupun antar sektor (Widyaiswara & Budiati, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2023) penelitian yang menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2016 hingga 2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas data *cross-section* dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah serta data *time series* untuk periode 2016 hingga 2020. Metode analisis yang digunakan untuk mengestimasi model regresi data panel adalah *Fixed Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sementara tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Handayani, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2025) merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh laju pertumbuhan penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap tingkat kemiskinan di sepuluh kabupaten termiskin di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2020–2024 dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis regresi data

panel. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa laju pertumbuhan penduduk menunjukkan dampak negatif terhadap kemiskinan, yang kontras dengan temuan banyak penelitian sebelumnya. Variabel Indeks Pembangunan Manusia terbukti memiliki peran penting dalam menekan tingkat kemiskinan melalui perbaikan mutu pendidikan dan taraf hidup. Selain itu, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto juga menunjukkan korelasi negatif dengan kemiskinan, meskipun keberhasilannya sangat ditentukan oleh distribusi keuntungan dari pertumbuhan (Aulia, 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Komang dan Sudemen (2024) adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk mengeksplorasi pola intervensi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan metode tinjauan literatur kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari 57 jurnal yang terindeks di SINTA 1 hingga SINTA 6. Dari hasil analisis data menggunakan *Nvivo*, hasil menyimpulkan bahwa intervensi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan diamati pada 2 tingkatan pemerintah, yaitu pusat dan daerah. Pemerintah pusat umumnya menerapkan kebijakan makro yang bersifat universal, sedangkan pemerintah daerah lebih fokus pada intervensi mikro yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Perbedaan ini juga tercermin dalam skala intervensi serta sumber daya yang dimiliki, di mana pemerintah pusat memiliki kemampuan untuk menjalankan program-program berskala besar, sementara pemerintah daerah lebih fleksibel dalam menanggapi kondisi setempat. Kolaborasi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah sangat krusial untuk mencapai pengentasan kemiskinan yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia (Komang & Sudemen, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Yasir *et al.* (2024) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan mengeksplorasi usaha pemerintah Jawa Tengah terhadap kemiskinan yang melanda pada periode 2020 hingga 2022. Penelitian ini menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah dengan *software* QGIS untuk sistem informasi geografis. Dari visualisasi hasil data menggunakan *quantum* geografis menyimpulkan bahwa terdapat variabel yang secara mempengaruhi tingkat kemiskinan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan dipengaruhi oleh faktor pendidikan, tingkat pengangguran, lokasi serta Indeks Pembangunan Manusia. Dengan menekankan variabel-variabel tersebut (Yasir *et al.*, 2024).